

Kualitas Pendidikan di Sulawesi Barat

Oleh: Rusman

Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

*e-mail: rusmanali@yahoo.co.id

Abstract

This study contains information on the quality of education in the West Sulawesi Province of Indonesia. Understanding of education, intent and purpose of knowing the quality of education in West Sulawesi and the solution to overcome the low quality of education in West Sulawesi. Education is human capital which is very important for a nation. With quality education humans can acquire knowledge such as ethics and morals, and various skills. However, the quality of education in West Sulawesi is still relatively low when compared to several regions in Indonesia, even in some countries. This can be seen by the 2017 data from BPS and the Ministry of National Education. Based on the 2018 Human Development Index data the quality of education in West Sulawesi is ranked 31st. To overcome this problem the government seeks to improve the quality of education through increasing education budgets by improving educational facilities and increasing access to education that is fair and equitable

Keyword: *Quality education, Educational facilities and Infrastructure, Access to education*

Abstrak

Penelitian ini memuat tentang bagaimana kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat Indonesia. Pengertian pendidikan, maksud dan tujuan mengetahui kualitas pendidikan di Sulawesi Barat serta solusi mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di Sulawesi Barat. Pendidikan merupakan modal manusia (human capital) yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Dengan pendidikan berkualitas manusia dapat memperoleh pengetahuan seperti etika dan moral, dan berbagai keahlian. Akan tetapi kualitas pendidikan di Sulawesi Barat saat ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya data dari BPS dan Depdiknas tahun 2017. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 kualitas pendidikan Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 31. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan akses pendidikan yang adil dan merata.

Kata kunci: pendidikan berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan, akses pendidikan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi di mana generasi muda adalah harapan bangsa ini dan harapan bagi mereka generasi muda meraih pendidikan setinggi-tingginya. Namun di era globalisasi telah mengubah cara berpikir masyarakat, yang cenderung meninggalkan budayanya. Pada saat ini memang pendidikan menjadi sangat penting.

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting sebuah negara. Dengan pendidikan yang berkualitas dan baik tentu akan melahirkan generasi yang pandai dan cerdas pada bidangnya. Dengan demikian kondisi negeri ini akan terus mengalami perbaikan oleh para generasi muda yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan

Pendidikan adalah merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap manusia. Dari pendidikan seseorang akan belajar tentang etika moral, ilmu pengetahuan dan interaksi sosial yang tinggi.

Kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Barat saat ini memang masih sangat memprihatinkan. Ini dinyatakan oleh Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Development Programme/UNDP) dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2015 dan Biro Pusat Statistik (2018) IPM Sulawesi Barat

berada di peringkat ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia, dimana komposisi ini terdiri dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala.

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia sendiri ternyata berada di peringkat ke 5 di bawah negara tetangga Malaysia dalam dunia pendidikan negara-negara ASEAN seperti dilansir Deutsche Welle. Saat ini Indonesia berada di posisi di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan atau keluar dari sekolah.

Kata kualitas mengandung banyak defenisi dan makna. Dari orang yang berbeda akan mengartikan secara berbeda. Ada yang menyebutnya: kesesuaian dengan persyaratan (tuntutan), kecocokan untuk pemakaian, perbaikan (penyempurnaan) berkelanjutan, bebas dari kerusakan (cacat), pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal, melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal, sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan demikian Tjiptono F (2003).

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 1(1 dan 4), yaitu “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan” (Husaini Usman:2006:7). Menurut Sunario seperti dikutip Usman (2006:7) potensi otak manusia yang digunakan untuk berpikir baru 4% .Jadi masih 96% dari otak manusia yang belum digunakan untuk berpikir.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003. Pengertian pendidikan merupakan usaha yang dilandasi kesadaran dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran dan suasana belajar. Supaya murid dapat mengembangkan potensi diri secara aktif untuk mendapatkan keterampilan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan kekuatan spiritual keagamaan yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan masyarakat (<https://salamadian.com/tujuan-pendidikan-nasional/>)

Selanjutnya pada alenia ke empat pembukaan UUD 1945 berbunyi sebagai berikut; “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagaimana UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 4 dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan adalah bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ. (<https://www.zonareferensi.com/tujuan-pendidikan/>)

Globalisasi merupakan sesuatu tidak bisa terlepas dalam perkembangan zaman saat ini. Meskipun dalam menjelaskan apa itu globalisasi tetapi paling tidak secara terminologi kata globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang mendunia. Globalisasi berawal dari kata *globe* yang artinya dunia dan *global* berarti sedunia.

Dari pandangan pemahaman secara sederhana globalisasi adalah era tanpa batas yang ditandai dengan perubahan struktur sosial ekonomi dan budayadi masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari tingginya keterkaitan antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi melalui perkembangan teknologi dan komunikasi

yang begitu cepat. Arus globalisasi juga dimaknai sebagai gerakan mendunia yang mempengaruhi pembentukan sistem dan nilai-nilai kehidupan yang mau tidak mau itu harus dihadapi.

Menurut Ulrich Beck dalam Sindhunata (2003) ada tiga penekanan sebagai kata kunci dalam memahami globalisasi diantaranya yaitu: 1) Deteritorialisasi yang berarti batas -- batas geografi ditiadakan atau tidak lagi berperan dan tidak lagi menentukan dalam perdagangan antarnegara, 2) Transnasionalisme ialah meniadakan batas - batas geografis seperti blok - blok, 3) Mutilokal dan translokal, dimana globalisasi memberikan kesempatan bagi manusia di berbagai belahan dunia membuka horison hidupnya seluas dunia, tanpa kehilangan kelokalannya.

Kehadiran globalisasi merupakan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Beberapa tantangan tersebut menurut Khaerudin Kurniawan (1999) diantaranya adalah: *Pertama*, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan (*continuing development*). *Kedua*, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional-agraris ke masyarakat modern-industrial dan informasi-komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM. *Ketiga*, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. *Keempat*, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang Iptek, yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut harus mampu mencetak generasi yang berkualitas sesuai dengan beberapa tantangan globalisasi. Lembaga pendidikan harus bisa menyiapkan lulusan yang siap kerja dan bersaing dengan tenaga kerja asing yang telah memasuki pasar global saat ini. Ketika ini bisa diwujudkan maka angka pengangguran terdidik yang terjadi saat ini bisa ditekan secara berangsur-angsur.

Pembenahan orientasi sistem pendidikan perlu dipahami secara komprehensif. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus garapan pendidikan saat ini diantaranya adalah: 1) Pendidikan hendaknya diarahkan pada proses pembentukan skill (keterampilan) yang tinggi bagi peserta didik. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran yang dilakukan diperlukan keseimbangan pembelajaran berbasis teori dan praktek. 2) Proses pembelajaran hendaknya mengedepankan pembelajaran berbasis siswa (*student centre oriented*). Dengan pembelajaran seperti ini diharapkan siswa menjadi mandiri sebagai bekalnya dikemudian hari. 3) Peningkatan kapasitas dan kemampuan pendidik harus menjadi prioritas utama. Upaya tersebut berupa peluang yang diberikan dan memfasilitasi para pendidik untuk menambah dan mengembangkan keilmuan mereka lewat studi lanjut, pelatihan, *workshop* dan lain-lain. 4) Proses pendidikan juga seharusnya diarahkan pada pemberian motivasi bagi peserta didik dalam menggapai mimpinya dengan mengedepankan proses bukan hasil yang serba instan. 5) Perlu adanya kesadaran dari semua pihak tentang tanggungjawab pendidikan. Kooperatif dari orang tua, masyarakat, pemerintah serta dunia kerja sebagai *stakeholders* pendidikan sangatlah dibutuhkan.

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN DI SULAWESI BARAT

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu :

a. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Sarana fisik umumnya banyak sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

b. Rendahnya Kualitas Guru

Kadaan guru di Sulawesi Barat masih banyak yang memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Kendati secara kuantitas jumlah guru di Sulawesi Barat cukup memadai namun tidak merata, dan secara kualitas mutu guru di daerah ini, pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Sulawesi Barat kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru di daerah ini relatif tidak terlalu buruk. Meskipun demikian, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang sangat kekurangan guru. Beberapa kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya dua hingga tiga orang, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.

Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (*under quality*), ada banyak guru hanya lulusan sekolah menengah yang kami temukan di Kabupaten Mamuju.

Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMK di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak didik dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik.

c. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Apabila pendapatan guru rendah, tentu banyak guru juga melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang, petani, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.

Berdasarkan UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.

Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah besar yang muncul. Dalam lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf yang ideal. Miris, guru digaji hanya Rp150.000 perbulan puluhan guru honorer di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat melakukan demo seusai Upacara Peringatan Hari Guru Nasional di depan kantor Bupati. Dengan menggunakan pengeras suara, puluhan guru honorer bergantian berorasi meminta Bupati Mamuju Utara segera menerbitkan SK Pengangkatan Guru Honorer Kabupaten. Puluhan guru ini juga mengaku digaji Rp5.000 hingga Rp10.000 perjam dan hanya mampu menghasilkan gaji sebesar Rp150.000 perbulan (25 November 2017).

d. Kualitas pendidikan

Bank Dunia menyebut Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Artinya, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, sektor pendidikan menjadi sangat penting.

Country Director of Director of the World Bank Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, sayangnya kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

"15 tahun reformasi pendidikan memberikan hasil yang beragam, dimana perluasan akses pendidikan telah signifikan, tetapi kualitas pendidikan masih rendah," ujarnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta (6/6/2018).

Berdasarkan data, tahun 2002 Indonesia sudah memulai serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pada saat itu munculah optimisme akan adanya perbaikan SDM di Indonesia.

"Kedua hal tersebut adalah penentu utama pengembangan sumber daya manusia," jelasnya.

Setelah 15 tahun berlangsung, hasil reformasi menjadi beragam. Jumlah siswa yang bersekolah telah tumbuh secara signifikan, tetapi kualitas pembelajaran siswa tetap berada di bawah tingkat daerah-daerah lebih lagi antara negara-negara lain. Rodrigo mencontohkan, 55% anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam yang kurang lebih tingkat buta hurufnya sekitar 10%.

Sementara langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, tindakan lebih lanjut sangat diperlukan, Pemerintah perlu langkah strategis lanjutan untuk mendongkrak SDM melalui sektor pendidikan. Langkah pertama bisa ditempuh dengan melakukan seleksi terhadap tenaga-tenaga pengajar yang ada di daerah Sulawesi Barat.

Pemerintah juga perlu melakukan kampanye kualitas pendidikan nasional untuk menciptakan kesadaran publik akan pentingnya pendidikan.

Mekanisme pembiayaan yang ada untuk pendidikan dengan transfer yang targetnya ditetapkan dengan baik dan berbasis kinerja untuk sekolah dan kabupaten yang tertinggal, terpinggirkan, terluar.

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia. Namun sayang proses berjalannya pendidikan ini tidak selamanya berjalan mulus, ada beberapa kendala yang kemudian menjadi problem yang menghambat proses pendidikan itu berlangsung.

Terbatasnya tenaga pendidik di Sulawesi Barat berdampak pada mutu dan kualitas anak didik. Karenanya, perlu solusi kongkrit untuk menyelesaikan masalah yang membelit daerah ini.

Diantara penyebab adalah jumlah tenaga guru dari semua tingkatan mulai tenaga pengajar SD, SMP dan SMU sangat minim, kata Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Barat Mulyadi Bintaha dan memperkirakan bahwa Sulbar masih membutuhkan kurang lebih sekitar 500 tenaga guru lagi yang akan disebar di enam kabupaten yang ada di Sulbar.

Kualitas anak didik tidak akan bisa tertangani dengan maksimal apabila daerah tidak menyiapkan tenaga pendidik yang handal. Oleh karena itu, lanjut Mulyadi, pemerintah menyiapkan kuota penerimaan CPNS agar kekurangan tenaga guru di daerah ini bisa terpenuhi.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Tomi memandang kurangnya jumlah tenaga pengajar ini menjadi keprihatinan. Hal itu dikarenakan akan memberi dampak negatif pada kualitas pendidikan yang ada di daerah ini. Jika dibandingkan daerah lain di Indonesia, utamanya Jawa, kualitas pendidikan di Sulbar dinilai masih sangat rendah," tuturnya. Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian penting dari pemerintah dan perlu terobosan baru dalam menyelesaikannya.

e. Akses Pendidikan Berkualitas

Pemerintah dan seluruh masyarakat harus bertindak cepat untuk menciptakan pendidikan secara merata, meluas dan berkeadilan. Agar akses pendidikan merata, meluas dan berkeadilan bisa diwujudkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Pertama, peningkatan pendapatan masyarakat. Penyebab tidak meratanya pendidikan di antaranya ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anaknya. Di beberapa desa dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat contohnya, banyak orang tua tidak menyekolahkan anaknya karena penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi di lapangan, anak-anak sejak umur 10 tahun lebih memilih ikut berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dengan bekerja ke laut atau ladang daripada bersekolah.

Pola pikir masyarakat di Sulawesi Barat sebagian besar masih lebih kepada cara bertahan hidup. Karenanya pemerintah perlu terlebih dahulu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat Indonesia meningkat tentu mereka akan memilih bersekolah.

Kedua, menciptakan pendidikan yang sesuai karakteristik masyarakat Sulawesi Barat. Pemerintah tidak semestinya membuat kebijakan yang sama untuk pendidikan di kota dan di desa. Sebagai contoh, di daerah kepulauan anak-anak terbiasa bermain di laut, sehingga perlu diciptakan proses belajar-mengajar yang sesuai dengan masyarakat di kepulauan atau di desa. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan guru yang bersedia mengabdikan untuk pendidikan anak-anak di daerah-daerah dan tentu saja untuk ini pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka.

Ketiga, peningkatan bahan bacaan. Buku merupakan media pembelajaran terpenting dalam proses belajar-mengajar. Karenanya diperlukan ketersediaan perpustakaan di seluruh daerah. Ketersediaan buku akan membantu guru dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Selain itu, adanya perpustakaan akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya dengan membaca buku. Budaya membaca buku perlu dikembangkan, supaya anak-anak tidak lebih senang bermain atau bersosial media.

Mewujudkan akses pendidikan yang merata, meluas dan berkeadilan juga bagian dari tanggung jawab seluruh masyarakat. Untuk ini diperlukan kesadaran dan kepekaan melihat sekeliling kita. Masyarakat Indonesia harus bergotong royong untuk menciptakan pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia, sehingga tercipta generasi bangsa yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bermartabat, makmur dan sejahtera. Bukankah salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SULAWESI BARAT

Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki attitude (sikap dan perilaku) yang positif. Pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pembangunan selalu berkaitan erat dengan perkembangan zaman serta selalu memunculkan persoalan baru yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya namun harus tetap disikapi dengan bijak. Bangsa ini sudah hampir terlambat untuk berubah terutama untuk merubah mutu pendidikan yang terpuruk.

Setiap lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar karena proses dan hasil pendidikan yang telah dicapainya. Mutu pendidikan akan dipersalahkan bila tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas pendidikan merupakan tentang dua sisi yang sangat penting yaitu proses dan hasil. Kualitas dalam proses pendidikan melibatkan berbagai input seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dukungan administrasi, berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang fair dan nyaman untuk belajar. Kualitas dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu.

Upaya peningkatan pendidikan berkualitas menjadi agenda penting pemerintah (Kemdiknas) beberapa tahun terakhir. Berbagai terobosan dan kebijakan penting telah diambil oleh Kemdiknas dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu sejalan dengan komitmen yang digariskan oleh UNESCO melalui program Education for All (EFA).

Salah satu program pemerintah yang sedang dilaksanakan sekarang adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Peningkatan kualitas di setiap satuan pendidikan, diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan yang seharusnya terjadi. Dengan demikian, peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan tantangan terbesar yang harus segera dilakukan oleh pemerintah (kemendiknas). Upaya-upaya yang sedang dilakukan pada saat ini adalah dengan melalui :

a. *Sertifikasi*

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud di sini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen.

b. *Akreditasi*

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan., berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Alasan kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan

c. Standarisasi

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi
- 3) Standar Proses
- 4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Pengelolaan
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan
- 8) Standar Penilaian Pendidikan

Fungsi dan Tujuan Standar :

- 1) Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- 2) Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- 3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sedang mengembangkan pendidikan ke arah standarisasi serta sertifikasi. Di dalam konsep ini, semua instrumen yang terlibat dalam pendidikan, haruslah bekerja secara profesional. Untuk mencapai itu, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan-aturan ideal. Aturan standar itu meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Semuanya indikator tersebut dijadikan sebagai panduan dalam menyusun standar pendidikan.

KESIMPULAN

- a. Pendidikan berkualitas memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi adalah bangsa yang sebagian besar dari sumber daya manusia yang dimilikinya berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya dihasilkan dari proses pendidikan yang berkualitas, melalui berbagai paradigma dan pembaharuan yang terjadi terutama inovasi-inovasi yang diimplementasikan di sekolah. Pendidikan berkualitas adalah dambaan serta harapan setiap orang ataupun lembaga pendidikan.
- b. Sekolah yang berkualitas akan menjadi tujuan masyarakat dan orang tua peserta didik dengan harapan mampu bersaing dalam memperoleh berbagai peluang, baik dalam meraih pekerjaan maupun dalam menjalani kehidupan.
- c. Namun demikian memajukan pendidikan bukan suatu pekerjaan yang mudah, terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi perkembangan pendidikan. Masalah utama pendidikan yang dialami terutama kualitas pendidikan sebagian besar sekolah masih belum bisa dikatakan baik. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan namun demikian hal ini tidak bisa langsung terlihat tetapi harus secara bertahap dan berkesinambungan serta diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dan inovatif, sehingga pendidikan berkualitas dapat terwujud.

- d. Profil pendidikan di Sulawesi Barat menunjukkan profil yang beragam, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan yang mencolok antar daerah seperti perbedaan antar pulau, perbedaan antar kota dan desa, dan perbedaan antar daerah maju dengan daerah terpencil. Ada tiga komponen besar untuk menentukan standar pendidikan menurut teori perencanaan pendidikan yaitu komponen standar kurikulum, standarisasi kinerja dan kesempatan belajar.
- e. Dalam mengatasi masalah pendidikan di Sulawesi Barat upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan berkualitas, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, menambah jumlah sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik dan kependidikan yang lebih profesional
- f. Tanpa ada inovasi yang signifikan maka kualitas pendidikan di sekolah tidak akan berubah, dalam melaksanakan rutinitas pekerjaan sebuah lembaga, tapi sebaliknya ketika proses inovasi berlangsung di sekolah melalui berbagai program dan kegiatannya secara terarah, teratur dan berkelanjutan tentunya akan menghasilkan sesuatu hal yang benar-benar diharapkan baik dari kualitas sekolah itu sendiri maupun kualitas peserta didiknya.

SARAN

Saran-saran berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran rekomendasi terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses inovasi pendidikan yang dilakukan secara cepat, terarah dan kontinu antara lain sebagai berikut :

- 1) Proses inovasi pendidikan yang dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan harus benar-benar terprogram sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah
- 2) Proses inovasi pendidikan di sekolah harus berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai unsur / faktor percepatan pelaksanaan inovasi sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud dengan optimal
- 3) Unsur-unsur pemercepat program inovasi baik secara internal maupun eksternal dan aspek-aspek lain yang mendukung harus benar-benar dioptimalkan keberfungsianannya sehingga akan mendorong keberhasilan program inovasi yang dilakukan
- 4) Diperlukan adanya pembahasan lanjutan oleh karena keterbatasan tulisan ini melalui penelitian yang temanya relevan, yang akan menjadi bahan kajian baru dan perbandingan serta pembaharuan konsep dan isi sehingga akan dirasakan lebih komprehensif dan lebih substantif.

Daftar Pustaka

- Fandy Tjiptono, (2003) “ *Prinsip-prinsip Total Quality Service* “ Yogyakarta: Andi
- Budiman Chr, (2010) “ *Manajemen Strategik* “ Jakarta : Universitas Terbuka.
- Prasetyoadi Warsono (2005) “ *Arus Balik Kependudukan* “ Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Rahmat Hasanuddin (2012) “ *Masa Lalu Masa Kini dan Masa Depan Sulawesi Barat* “ The Sulbar Center
- Undang –Undang (2003) Nomor 20 Tahun 2003 tentang “ *Sistem Pendidikan Nasional* “ Jakarta : Depdiknas
- Mubyarto, (2001) “ *Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia* “ Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro, (2004) “ *Otonomi dan Pembangunan Daerah* “ Jakarta : Erlangga
- Sutarto, (2002) “ *Dasar-Dasar Organisasi* “ Yogyakarta : Gadj Mada University Press.
- Muh.Idham Khalid Bodi (2008) “ *Local Wisdom* “ Makassar : Nuqtah
- Gary Dessler, (1997) “ *Human Resource Management* “ New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- John Suprihanto (2001) “ *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan* “ Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2013/12/rendahnya-kualitas-pendidikan-di_29.html

<https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180103112420-445-266335/ada-apa-dengan-pendidikan-di-indonesia/>

<http://www.sarjanaku.com/2011/09/mutu-pendidikan-pengertian.html>

<https://www.kompasiana.com/khairulazan130320/59dc880e3f8bf43be42512e2/tantangan-pendidikan-di-era-globalisasi>

<https://daerah.sindonews.com/read/1260574/174/hanya-digaji-rp150000-perbulan-guru-honor-di-mamuju-utara-demo-1511602417>

<https://news.okezone.com/read/2018/06/06/65/1907446/bank-dunia-sebut-kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-rendah>

<https://restiyantis.wordpress.com/2016/05/03/kebijakan-pemerintah-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

<http://edihardiana.blogspot.com/2010/05/>

<https://www.zonareferensi.com/tujuan-pendidikan/>